

ABSTRAK

PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DARI TANAH NEGARA MENJADI TANAH HAK MILIK ATAS RUMAH DINAS BAGI 17 PEGAWAI PT PLN YANG TELAH PENSIUN DI KABUPATEN SEMARANG

Pemberian Hak Atas Tanah dari tanah negara menjadi tanah hak milik bagi pegawai PT PLN Kabupaten Semarang yang pernah menempati rumah dinas tersebut tidak melalui mekanisme jual beli pada umumnya, karena status rumah dan tanah tersebut adalah milik negara sebagaimana Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal Yang Telah Dibeli Oleh Pegawai Negeri Dari Pemerintah.

Permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan pemberian hak atas tanah dari tanah negara menjadi tanah hak milik atas rumah dinas bagi 17 pegawai PT PLN yang telah pensiun di Kabupaten Semarang. Selain itu apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemberian hak atas tanah dari tanah negara menjadi tanah hak milik atas rumah dinas 17 pegawai negeri PT PLN yang telah pensiun.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini deskripsi analitis dengan pendekatan Yuridis Empiris berdasarkan data primer berupa wawancara dengan para pihak yang berkaitan secara langsung agar mendapatkan informasi yang se jelasnya sesuai keadaan di lapangan.

Hasil penelitian ini pada akhirnya memberikan gambaran terjadinya pemberian Hak Atas Tanah dari rumah dinas PT PLN kepada 17 pegawainya yang telah pensiun melalui tahapan sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 89/KMK.013/1991 tentang Pedoman Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara. Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pemberian Hak Atas Tanah ini antara lain adalah mahal nya biaya yang harus dikeluarkan dan kurangnya pemahaman dalam hal pengajuan permohonan Hak Atas Rumah Dinas tersebut, serta lama nya waktu yang diperlukan untuk proses penerbitan Sertipikat.

Saran dari penelitian ini adalah bagi pihak pemerintah dan khususnya PT PLN harus lebih memberikan pemahaman kepada karyawan mengenai hak mereka dalam hal kepemilikan Rumah Dinas. Selain itu pembiayaan yang mahal dan lamanya waktu penerbitan sertipikat juga harus dikaji kembali apakah telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak, hal ini diperlukan dalam menjaga kewibawaan instansi terkait dalam pelaksanaan pemberian hak tersebut.

Kata kunci: Hak Atas Tanah Negara, Tanah Hak Milik, Pendaftaran Tanah Hak Penyerahan

ABSTRACT

GRANTING OF RIGHT TO LAND FROM STATE LAND TO BE RIGHTS OF OF OWNERSHIP OVER GOVERNMENT PROPERTY FOR 17 PTN PLN RETIRED EMPLOYEES IN SEMARANG DISTRICT

Granting Rights to Land of the ground state into land ownership to the employees of PT PLN District Semarang ever occupy the home office is not through nekanisme trading in general, because the status of the house and the land belonged to the state's decision State Minister of Agrarian / Head of National Land Agency no. 2 Year 1998 on Granting Rights to Land for Residential Has Purchased By Public Servant of the Government.

The problems that can be raised in this study can be formulated as follows: How can the implementation of land titling of land to state land ownership rights to the home office for 17 employees of PT PLN who have retired in the District Semarang. Besides focusing problems what are the bottlenecks in the implementation of land titling of land into state land ownership rights to the home office of PT PLN 17 civil servants who have retired.

The method used in this study derskripsi Juridical Empirical analytical approach based on primary data such as interviews with the parties directly concerned in order to obtain information sejasasnya according to circumstances on the ground.

The results of this study provide an overview ultimately granting the Land of the official residence of PT PLN to 17 employees who had retired through the stages according to the Decree of the Minister of Finance No.. 89/KMK.013/1991 on Guidelines for Transfer of Fixed Assets of State Owned Enterprises. Obstacles encountered in the implementation of the provision of Land Rights, among others, is the high cost that must be paid and a lack of understanding in terms of submission of application for the Right to the home office, as well as his long time required for the issuance of certificate. Recommend from The studies are expected to provide input to the government, especially in the areas of land. The government and especially the PT PLN should give more understanding to employees about their rights in terms of ownership of the Home Office.

Suggestion of this studies is for the government and especially the PT PLN should give more understanding to employees about their rights in terms of ownership of the Home Office. In addition financing is expensive and the length of time the certificate issuance should also reconsider whether it has been implemented in accordance with the legislation or not, it is necessary to maintain the authority of the agencies involved in the implementation of these entitlements.

KeywordsState Land Rights, Land Ownership, Land Registration, Submission Rights